

Ganjil Genap Diterapkan di Ruas Tol 20 Desember 2021 - 2 Januari 2022

JAKARTA (IM) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah berencana menerapkan sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan tol mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Sistem ganjil genap juga akan diterapkan di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas.

"Sistem ganjil genap diterapkan di ruas jalan tol Tangerang-Merak, ruas tol Bogor-Ciawi-Cigombong, ruas tol Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 Januari," kata Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).

Penerapan sistem ganjil genap biasanya dapat menurunkan mobilitas masyarakat

sekitar 30 persen. Selain menerapkan ganjil-genap, pemerintah juga akan menerapkan buka-tutup tempat istirahat (rest area), sistem satu arah (one way), sistem lawan arah (contraflow), serta melakukan tes acak di rest area dan tempat-tempat yang ditetapkan.

"Kita lakukan one-way, contraflow, dan berbagai upaya yang penting kita akan melakukan random sampling tentang ketepatan mereka tentang PeduliLindungi dengan dua kali vaksin dan melakukan antigen," kata Budi.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan sistem ganjil-genap, pembatasan kapasitas, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat wisata. Budi menyebutkan, pemerintah juga akan menutup sementara tempat wisata yang tidak memiliki pengelola. ● han

Polhukam

FOTO/ANT



RAKER MENTERI PUPR DENGAN KOMISI V DPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) menerima pandangan fraksi dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Sarce Bandaso Tandiasik (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12). Rapat tersebut membahas tentang pengam-bilan keputusan perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Masyarakat Diminta Waspada Lonjakan Covid-19 dan Masuknya Varian Omicron saat Libur Nataru

Diperkirakan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Hal ini dapat memicu kenaikan kasus Covid-19. Apalagi sejumlah negara melaporkan adanya varian Omicron.

JAKARTA (IM) - Masyarakat Indonesia diminta mewaspadai terjadi lonjakan Covid-19 dan masuknya varian Omicron, yang disebut-sebut lebih cepat menular dar pada varian Delta, setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Sebagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus baru, masyarakat diminta dalam merayakan Natal dilakukan secara virtual. Demikian juga untuk Tahun Baru 2022, masyarakat diminta agar melakukan silaturahmi dengan cara virtual.

Imbauan ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menjelaskan langkah langkah pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dan mencegah masuknya varian Omicron pada Rabu (1/12).

Wiku menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengendalian berlipis untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 jelang periode

Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) serta mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia.

Saat libur Nataru diperkirakan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat sehingga dapat memicu kenaikan kasus Covid-19. Apalagi saat ini sejumlah negara melaporkan adanya varian baru atau Omicron. Wiku menjelaskan kebijakan pemerintah dengan strategi pengendalian berlipis. Hal ini penting dipahami masyarakat luas agar dapat dipatuhi dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah. Pertama, pembatasan mobilitas domestik secara situasional. Yaitu sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, lokasi wisata dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat.

Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan

skrining kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin maupun logistik. Dibentuk juga posko checkpoint untuk random testing di daerah masing-masing. Selain itu, memantau mobilitas pada jalur darat yang seringkali lolos dari pengawasan.

Kedua, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan protokol kesehatan pada jenis aktivitas ibadah. Termasuk imbauan perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadakan cuti Nataru, mudik dan libur sekolah.

Lalu yang ketiga, pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik. Hal ini sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalkan kembali Satgas Covid-19 di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan.

"Pemerintah Daerah perlu segera membentuk bagi daerah yang belum memilikinya pasti-melapor pemantaunya ke sistem yang terpusat di Satgas Covid-19 nasional," ucap Wiku.

Selain dinamika dalam neg-

eri, pemerintah terus memantau dinamika global. Mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dipisahkan berpeluang importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas batas negara.

"Untuk itu pemerintah Indonesia juga melakukan antisipasi kenaikan kasus akibat importasi kasus dan varian," kata Wiku.

Pertama, memperpanjang durasi karantina menjadi 14 hari bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama 14 Hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron.

Negara-negara itu di antaranya Afrika Selatan, Botswana dan Hongkong. Lalu Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Swaziland dan Lesotho. Sedangkan karantina 7 hari untuk WNI atau WNA dalam 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang tidak disebutkan sebelumnya.

Kedua, penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas yang sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan, pemegang KITAS atau KITAP serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron. Serta memenuhi syarat berwisata di Indonesia

lainnya.

"Sebagai tambahan, pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik akan dibebaskan dari kewajiban karantina, namun tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu implementasi sistem bubble," ujarnya.

Perlu diketahui bahwa upaya skrining pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan. Seperti skrining berkas dan kondisi kesehatan umum, serta tes ulang tetap dilakukan di mana entry test di hari yang sama saat kedatangan dan exit tes pada hari ke-6 untuk mereka yang wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari.

Selain itu, pemerintah mewajibkan spesimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan diim-bau juga untuk spesimen dari negara lainnya untuk diintensi-fikan sequencing-nya.

Ada tiga aspek yang harus dikendalikan untuk mencegah lonjakan kasus. Yaitu mencegah importasi kasus khususnya kasus dengan varian of concern, mengendalikan mobilitas yang aman dan menegakkan protokol kesehatan. " "

Untuk itu mari kita berjuang bersama baik unsur pemerintah masyarakat, akademisi, swasta dan rekan-rekan media untuk tetap mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada," tutur Wiku. ● mar



FOTO: ANT

AKSI SOLIDARITAS UNTUK JURNALIS NURHADI

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas terhadap jurnalis Nurhadi di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (1/12). Dalam aksi tersebut mereka meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menuntut seberat-beratnya dua terdakwa aparat kepolisian yang melakukan kekerasan kepada jurnalis Tempo Nurhadi.

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Kendaraan Operasional dari Mabesad

JAKARTA (IM) - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, memimpin acara penyerahan kendaraan taktis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Forces Armored dan Kendaraan Bermotor Honda CRF 150 L di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Selasa (30/11).

"Hari ini merupakan momen yang menggembirakan, sebab Kodam XVII/Cenderawasih kembali menerima kendaraan dinas hasil pengadaan TNI AD tahun 2021. Pendistribusian kendaraan bermotor ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari pimpinan TNI AD kepada satuan jajaran TNI AD termasuk Kodam XVII/Cenderawasih untuk mendukung tugas pokok," kata Pangdam XVII/Cenderawasih, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan Rabu (1/12).

Selanjutnya, Pangdam XVII/Cenderawasih menerangkan, 67 kendaraan tersebut terdiri atas 3 Kendaraan Taktis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Forces Armored dan 64 Kendaraan Bermotor Honda CRF 150 L.

"67 kendaraan tersebut nantinya akan diserahkan ke beberapa satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih yaitu: di wilayah Jayapura 30 unit, Biak 4 unit, Nabire 20 unit, Timika 4

unit, Merauke 6 unit dan untuk Kendaraan Taktis ILSV akan diberikan kepada Korem 172/PWY, Kodim 1705/Nabire dan Kodim 1710/Mimika," ujar Pangdam XVII/Cenderawasih menjelaskan.

Dengan dukungan tersebut Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, berharap kendaraan-kendaraan tersebut dapat digunakan, dirawat, dan dijaga dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung tugas pokok satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih.

"Setelah saya serahkan kendaraan dinas ini, agar dirawat, dijaga, dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, intinya adalah perawatan rutin yang paling penting serta pedomani 16 tugas pengemudi sehingga akan memperpanjang usia pakai kendaraan," tuturnya.

Di akhir sambutannya Pangdam kembali menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat mengapresiasi pimpinan TNI AD yaitu Bapak Kasad atas perhatian yang telah diberikan kepada Kodam XVII/Cenderawasih.

Sementara itu, usai acara penyerahan kendaraan tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pejabat Kodam lainnya mengecek secara langsung kendaraan yang telah digelar di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih. ● mei

KPU: Pelaksanaan Pemilu 2024 akan Digelar pada 21 Februari

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tantowi, menyebut jadwal pelaksanaan pemilu umum (Pemilu) 2024 yang telah diusulkan KPU telah disepakati oleh semua pihak.

Pramono menyampaikan, dalam rangka mencermati pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 ini, KPU

telah mendengar masukan dari banyak pihak. Dalam hal ini, KPU sudah memaparkan bagaimana semua tahapan jika Pemilu digelar pada tanggal 21 Februari 2024.

"Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," kata Pram dalam

keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Disamping itu, KPU juga mengapresiasi kepada semua pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.

"(Hal tersebut) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu pasal 167 ayat (2) dan pasal 347 ayat (2)," ujarnya. ● mei

Sidang Pembacaan Dakwaan Munarman Ditunda, Kuasa Hukum Keberatan Soal BAP

JAKARTA (IM) - Sidang pembacaan dakwaan terhadap eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme ditunda. Sejatinya jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (1/12).

"Kalau memang BAP tidak diberikan, bagaimana kami akan memberikan pembelaan kepada terdakwa? Kan begitu," ujar Sulistyowati.

Selain itu, kubu kuasa hukum juga keberatan dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang main ponsel di ruangan sidang.

"Jadi pada saat kami di-

menerima BAP.

"Bahwa untuk kepentingan pembelaan, maka berita turunan dari berita acara pemeriksaan itu harus diberikan kami," kata kuasa hukum Munarman, Sulistyowati, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (1/12).

"Kalau memang BAP tidak diberikan, bagaimana kami akan memberikan pembelaan kepada terdakwa? Kan begitu," ujar Sulistyowati.

Selain itu, kubu kuasa hukum juga keberatan dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang main ponsel di ruangan sidang.

"Jadi pada saat kami di-

larang, semua handphone harus masuk, ternyata jaksa main handphone (HP)," ujar Sulistyowati.

Sebelum menutup sidang, hakim juga meminta jaksa penuntut umum (JPU) agar tidak bermain ponsel.

"Untuk masalah HP, kita sama. Kalau tidak boleh ya tidak boleh semua. Tolong di sidang berikutnya jangan sampai ada yang bawa HP," kata hakim.

"Kemudian soal berita acara silakan dilakukan permintaan berita acara. Sidang selesai dan ditutup," kata hakim. Sidang akan digelar kembali pada Rabu pekan depan. ● mei

PENGUMUMAN

Bahwa kami, Direksi PT ADIPROTEK ENVIRODUNIA, berkedudukan di Jakarta Timur ("AE"), dengan ini memberitahukan bahwa kami berencana akan melakukan pengambilalihan saham dalam PT JUNGLELAND ASIA, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan"), melalui penyerahan modal dalam Perseroan. Dalam hal penyerahan modal telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka AE akan memiliki 65% (enam puluh lima persen) dari total seluruh saham Perseroan, sehingga akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal Pengumuman ini.

Kabupaten Bogor, 2 Desember 2021

Direksi
PT ADIPROTEK ENVIRODUNIA

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT BALI CIPTA PRIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 27 November 2021 para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui peralihan lebih dari 50% saham-saham dalam Perseroan dimana pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Direksi Perseroan dengan alamat Jl. Arteri Kelapa Gading, Rukan The Fifty No. 18, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan disertai bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 02 Desember 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

PENGURANGAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR

PT. ANUGERAH SAKTI ENERGI UTAMA

Direksi Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH SAKTI ENERGI UTAMA berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditur bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 November 2021, bertempat di alamat Perseroan, para pemegang Saham telah memberikan persetujuan atas pengurangan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp.10.000.000.000,- menjadi Rp.5.500.000.000,-.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan pasal 44 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 02 Desember 2021
PT. ANUGERAH SAKTI ENERGI UTAMA ttd
Direksi

POWER AUCTION

LELANG OTOMOTIF

PT. POWER ASEINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Ekstensi Sulebata atas barang bergerak berupa RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR yang terdiri dari berbagai merk dan tipe, pada:

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Selasa - Rabu, 07 - 08 Desember 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 09 Desember 2021	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 14 - 15 Desember 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 16 Desember 2021	11.00 s/d Selesai
Rabu - Kamis, 22 - 23 Desember 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Jumat, 24 Desember 2021	11.00 s/d Selesai

SYARAT & KETENTUAN LELANG :

- Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar:
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPLP MOBIL
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPLP MOTOR
- Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ("as is")
- Uang Jaminan dan pelunasan diserahkan ke rekening a/n PT. Power Aseindo Selaras A/C no. 5719999971 di BCA cab. Kiyi Caringin, Jakarta Pusat
- Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka peminat lelang dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan hangus
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Aseindo Selaras, telp : 0212 1217 1851 (Nadi) atau melalui email: yudi.darmawan@power-auction.id

Jakarta, 2 Desember 2021
PANITIA LELANG

LOKASI OPEN HOUSE & LELANG

Jl. Palembang No.38 RT. 07 RW.06, Petungkun Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Kini Giliran Eks Dirut PNRI Diperiksa KPK sebagai Tersangka kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya (IEW, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (e-KTP), di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (1/12).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/12), mengatakan, selain Isnu, tim penyidik juga memeriksa Pauline Tannos dari PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi, Wahyudin Bageda yang menjabat Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan/ mantan Direktur Utama PT LEN Industri, serta Rini Winarta dari PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi.

Mereka bakal diperiksa untuk tersangka kasus e-KTP lainnya, yaitu Direktur Utama

PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (PLS). "Tim penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka PLS," kata Ali.

Sebelumnya, pada 13 Agustus 2019 lalu, KPK telah menetapkan Isnu bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka baru kasus korupsi e-KTP. Isnu juga merupakan Ketua Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HF).

Mwreka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TROLI PRESTASI NIAGA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diterbitkan dalam Akta No. 32, tanggal 30 November 2021, dibuat di hadapan TIFFANY VALENCYA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 30 November 2021, Perseroan telah dibubarkan. Pihak-pihak yang berkepentingan, para kreditor yang mempunyai tagihan kepada Perseroan, harap mengajukan pada hari dan jam kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan (dalam likuidasi), yang telah ditunjuk, yaitu:

Gedung Menara Kuningan Lt. 30 Suite 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. 5 Rt. 006, Rv. 007, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12940.

Jakarta, 02 Desember 2021
Tim Likuidasi
PT TROLI PRESTASI NIAGA

PENYEBARAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. RETAIL FIRSATA ASSETINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 20 Nopember 2021, telah diputuskan:

- Menyetujui untuk membubarkan Perseroan.
- Menyetujui menunjuk Tri Achmad Zaki Amuliah dan atau Direksi Perseroan sebagai likuidator.

Kepada kreditor atau para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi likuidator pada alamat Perseroan, Jl. Teuku Nyak Arief No.14, Jakarta Selatan, untuk menyelesaikan hutang piutang Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman ini ditempat kedudukan Perseroan tersebut di atas.

Jakarta, 01 Desember 2021
Direktur